

Agama dan Budaya dalam Integrasi Sosial (Belajar dari Masyarakat Fakfak di Propinsi Papua Barat)

Saidin Ernas

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Heru Nugoro

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Zuly Qodir

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diterima redaksi 14 Maret 2014, diseleksi 8 April 2014 dan direvisi 28 April 2014

Abstract

This article argues that the social dynamics of conflict in Papua do not always consist of conflict. The case of Fakfak, West Papua demonstrates that peace and harmony also exists. This study utilizes the qualitative descriptive analysis method to study data gathered from observations made during fieldwork, interviews, and primary and secondary documents. The article argues two main points. First, religion and culture have an important role in building social norms of harmony that influence the social behavior of the individuals in social arenas such as politics and economics. Second, the institutionalization of values and norms are supported by both the government and civil society when they share the same vision for promoting peace and harmony. However, this study also acknowledges that factors such as separatism and religious radicalism, if not handled well, can break the harmonious social integration in Fakfak.

Keywords: *Social Integration, Religion, Culture.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa dinamika sosial kemasyarakatan di Papua ternyata tidak selalu menghadirkan cerita tentang konflik dan disintegrasi, tetapi juga tentang harmoni dan perdamaian sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Fakfak di Propinsi Papua Barat. Dengan metode *deskriptif analysis* terhadap data-data kualitatif yang dikumpulkan dari observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi, penulis berhasil memperoleh beberapa temuan penting. *Pertama*, agama dan budaya berperan penting dalam melahirkan norma-norma sosial yang harmonis yang mempengaruhi praktik-praktik sosial individu hingga pada arena sosial yang lebih luas seperti politik dan ekonomi. *Kedua*, proses pelembagaan nilai dan norma didukung oleh pemerintah dan kekuatan *civil society* yang memiliki misi yang sama untuk mempromosikan harmoni dan perdamaian. Namun tulisan ini juga mengingatkan bahwa isu-isu konflik, seperti separatisme dan radikalisme agama, bila tidak ditangani dengan hati-hati bisa merusak integrasi sosial di Fakfak.

Kata Kunci: Integrasi Sosial, Agama, Budaya.

Pendahuluan

Sejauh ini studi tentang perdamaian di Papua masih dianggap sebagai sesuatu yang kurang menarik, karena dianggap keluar dari opini dominan yang telah mengkonstruksi Papua sebagai wilayah konflik yang paling panas di Indonesia. Para peneliti ilmu sosial dan dunia akademik seakan terjebak pada diskursus konflik yang cenderung hegemonik tersebut, sehingga berbagai penelitian tentang Papua lebih menyoroti dinamika konflik dan kekerasan (CSIS, 2006, LIPI, 2009). Orang Papua masih dilihat sebagai objek yang diam atau tidak mempunyai prakarsa untuk menggagas perdamaian. Rentetan konflik politik, sosial dan ekonomi yang memanjang sejak integrasi Papua dengan Indonesia, dikonstruksikan sebagai narasi dominan yang memperlihatkan kesulitan untuk membangun perdamaian Papua berdasarkan inisiatif lokal. Padahal masyarakat Papua pada dasarnya mempunyai kekuatan dari dalam untuk mengelola konflik sosial dan kekerasan dengan cara-caranya sendiri yang kemudian terbukti sukses mengendalikan konflik dan kekerasan, sebagaimana terjadi dengan masyarakat di wilayah Fakfak, Propinsi Papua Barat.

Situasi harmonis di Fakfak dan sekitarnya menunjukkan bahwa terdapat dinamika konflik dan integrasi yang terjadi secara berbeda pada setiap wilayah di Papua. Pada kasus Fakfak, integrasi sosial dapat berjalan dengan baik karena ada berbagai faktor yang mendukungnya. Integrasi dibangun secara kultural di atas kesadaran dan inisiatif lokal, sehingga memiliki makna dan kekuatan dari dalam untuk merawat keragaman, baik agama, budaya, maupun perbedaan kepentingan ekonomi dan politik. Hal ini berbeda dengan konsepsi integrasi sosial yang selama ini difahami dan dipraktikkan selama kurun waktu kekuasaan Orde Baru (1971-1998). Keragaman di dalam

masyarakat selalu dipersepsikan sebagai sumber konflik yang harus ditangani dengan cara-cara yang hegemonik, yaitu melakukan penyeragaman dengan memaksakan identitas nasional yang tunggal.

Model integrasi sosial yang dipaksakan melalui berbagai instrumen kekuasaan, tentu menafikkan kemungkinan adanya nilai-nilai tertentu yang mampu mendorong masyarakat untuk mengelola perbedaan dengan cara-cara yang tepat, sehingga melahirkan integrasi dan harmoni sosial yang otentik di dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat di berbagai daerah berhasil membangun dan menciptakan harmoni sosial melalui mekanisme kultural yang dibangun di atas norma-norma, nilai-nilai dan moralitas budaya yang mengikat mereka dalam keseimbangan. Sebut saja misalnya tradisi *Bela Baja* di Pantar Nusa Tenggara Timur yang menjadi pengikat persaudaraan antara umat Islam dan Kristen (Rita Pranawati, 2011), atau tradisi *Pela Gandong* di Maluku Tengah yang membantu proses penyelesaian konflik di Maluku (Ernas, 2006). Demikian juga tradisi *Satu Tungku Tiga Batu* di Fakfak Papua Barat (Iribaram, 2011). Namun berbagai kearifan lokal tersebut masih dipandang sebelah mata, karena dianggap tidak cukup kuat dan teruji untuk menyelesaikan konflik. Cara pandang seperti ini menyebabkan pemerintah cenderung mengabaikan cara-cara lokal dalam penyelesaian konflik.

Hal ini misalnya dapat diamati secara jelas dalam proses penanganan masalah-masalah di Papua yang berlangsung selama ini. Pemerintah cenderung mengedepankan proses politik dan kekuasaan. Padahal konflik Papua merupakan jenis konflik yang telah berkembang dengan dinamika yang sangat kompleks. Dari masalah historis yang berkaitan dengan proses integrasi Papua ke dalam NKRI yang oleh Jacques

Bernard (2004:135), disebut sebagai “ *the late integration* (proses integrasi yang terlambat), hingga soal kegagalan pembangunan, diskriminasi sosial, dan kekerasan politik dan pelanggaran HAM (Muridan S. Widjono, 2009:3-19). Kegagalan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang saling terkait dengan politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama di Papua, semestinya mendorong kita untuk mengkaji berbagai alternatif lain dalam menyelesaikan masalah Papua. Dalam dimensi tertentu kita dapat belajar dari fenomena damai dan harmonis yang terjadi di Fakfak dan sekitarnya, dimana perdamaian dan harmonisasi melibatkan masyarakat dan nilai-nilai lokal yang mengikat mereka dalam keseimbangan, sehingga relasi sosial yang terbentuk adalah keberadaan (ko-eksistensi), kerjasama (kolaborasi) dan kerekatan (kohesi) yang membentuk integrasi sosial.

Apa yang terjadi di Fakfak tentu sangat menarik untuk dikaji dan diteliti, di tengah harapan untuk mengelola konflik yang terjadi di Papua dengan cara-cara yang lebih baik, beradab, demokratis dan bisa diterima oleh semua kekuatan sosial politik di Papua. Dalam kaitan itu, maka kajian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadi penentu di dalam integrasi sosial di Fakfak? Bagaimanakah proses pelembagaan nilai-nilai integrasi sosial tersebut sehingga membentuk ruang sosial yang harmonis? Terakhir, studi ini juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat Fakfak, di tengah perubahan sosial yang terus terjadi di Papua dewasa ini?

Teorisasi Konsep Integrasi

Secara umum teori utama yang dipilih sebagai *grand theory* dalam memahami fenomena yang menjadi *locus* penelitian ini, yakni teori integrasi sosial (*social integration*). Namun untuk

menjelaskan kasus integrasi sosial yang terjadi di Fakfak, maka *grand theory* tersebut akan diperkuat oleh beberapa teori dan konsep lain yang memiliki relevansi, seperti teori tentang konflik dan konsensus serta teori reproduksi sosial. Berikut ini akan dijelaskan konsep-konsep tersebut sehingga membentuk sebuah kerangka teoritik yang diperlukan untuk menjelaskan integrasi sosial yang terjadi pada masyarakat Fakfak.

Secara sosiologis, teori integrasi sosial merupakan bagian dari paradigma fungsionalisme struktural yang diperkenalkan Talcot Parson (1927-1979). Paradigma ini mengandaikan bahwa pada dasarnya masyarakat berada dalam sebuah sistem sosial yang mengikat mereka dalam keseimbangan (*ekuilibrium*). Hal ini tercermin dari dua pengertian dasar integrasi sosial yaitu, *pertama*, pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan *kedua*, menyatukan unsur-unsur tertentu dalam suatu masyarakat sehingga tercipta sebuah tertib sosial (Ritzer, 2009:258). Biku Parekh (2008:84-87) menyebutkan bahwa proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat hanya dapat tercipta bila terpenuhi tiga prasyarat utama. *Pertama*, adanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial (*moral contract*). *Kedua*, sebagian terhimpun dalam berbagai unit sosial, saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Hal ini untuk menjaga terjadinya dominasi dan penguasaan dari kelompok mayoritas atas minoritas. *Ketiga*, terjadi saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun di dalam suatu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Kontrak moral (*a moral contract*) adalah ketaatan terhadap nilai-nilai yang menjadi *platform* bersama dalam masyarakat, sehingga

membentuk semacam kepemilikan bersama atas nilai-nilai tersebut. Ia menjadi titik temu perbedaan yang harus ditaati dalam sebuah masyarakat untuk menjamin tegaknya perdamaian. Ketaatan pada *moral contract* akan menempatkan masyarakat pada kondisi yang *equal* sebab masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab yang sama dalam kehidupan sosial (Parekh, 2008).

Proses integrasi sosial dalam sebuah masyarakat tentu tidak menafikkan adanya konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena sosial dan perubahan karena konflik, seperti yang dijelaskan Ralf Dahrendorf adalah fenomena sosial yang selalu hadir (*inherent omni presence*) dalam setiap masyarakat manusia (Ritzer, 2009). Dengan kata lain konflik yang hebat sekalipun memiliki peluang untuk dapat dipadamkan atau didamaikan dengan mengombinasikan dua pola sekaligus. *Pertama*, membangun konsensus yang mempertemukan “kepentingan-kepentingan” kelompok yang bertikai tersebut ke dalam sebuah tatanan kekuasaan yang dapat mengurangi perbedaan (Maswadi Rauf, 2000:15. *Kedua*, melakukan usaha yang serius untuk mendorong penguatan kembali nilai-nilai kebersamaan yang disebut Parekh (2008:87) sebagai “kontrak moral” antar kelompok dan individu dalam sebuah masyarakat majemuk.

Pierre Bourdieu (1930-2002), menawarkan konsep *habitus* dan *field* (ranah) untuk menganalisis kontestasi nilai dan norma dalam ruang sosial yang luas. *Habitus* adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Menurut Bourdieu (1977:72), individu menggunakan *habitus* untuk berhubungan dengan realitas sosial karena ia telah dibekali dengan serangkaian skema terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, mengapresiasi dan mengevaluasi dunia

sosial seperti halnya konsepsi tentang benar-salah, baik-buruk, berguna-tidak berguna, terhormat-terhina (Mohammad Adib, 2012:97). Adapun *field* (ranah) merupakan jaringan relasional antar posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran individual. Oleh karena itu, ranah bukan ikatan intersubyektif antara individu, namun bermacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu. Ranah merupakan metafora yang digunakan Bourdieu untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis dengan daya-daya yang dikandungnya. (Ritzer dan Goodman, 2010:582-590). Praksis dari kerangka konseptual Bourdieu ini memiliki relevansi untuk menjelaskan fenomena harmoni sosial yang terbentuk pada masyarakat Fakfak karena sebuah masyarakat yang teratur dan harmonis merupakan perwujudan dari adanya sistem nilai yang dianut oleh masyarakat yang cenderung menghindari konflik dan adanya ruang sosial yang mendukung terwujudnya kondisi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan terhadap masyarakat Fakfak di Propinsi Papua Barat. Asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahwa integrasi dan harmoni yang terjadi di Fakfak tampaknya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu (1) Fakfak memiliki sejumlah karakteristik dan keunikan dibandingkan wilayah lainnya di Papua sehingga dinamika intergasi sosial yang tercipta memiliki keberhasilan yang sangat tinggi; (2) Budaya dalam masyarakat Fakfak merupakan modal sosial yang sangat penting dan strategis sehingga mampu merekatkan perbedaan-perbedaan agama, etnisitas, pandangan dan status ekonomi dalam satu hubungan sosial yang

harmonis; (3) Di Fakfak, nilai-nilai kultural tersebut sudah dapat dilembagakan dalam sistem pemerintahan, politik dan ekonomi sehingga memberikan jaminan kuat pada keberlanjutan harmoni dan perdamaian. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan beberapa strategi yang digunakan dalam pendekatan kualitatif; pengamatan (*observation*), wawancara mendalam (*indepth-interview*) dan studi pustaka (*library research*).

Hasil dan Pembahasan.

Sekelumit tentang Fakfak

Fakfak merupakan salah satu kabupaten tertua di Papua bersama delapan kabupaten lainnya yang pertama kali dibentuk pemerintah Indonesia dan terletak di bagian leher dari “kepala burung” Pulau Papua yang saat ini menjadi bagian dari Propinsi Papua Barat. Di era kolonialisme Belanda, Fakfak bersama Manokwari dikenal sebagai dua pusat pemerintahan yang disebut *Afdelling*. Bahkan bila ditarik jauh ke belakang, pada masa kerajaan Majapahit, khususnya masa pemerintahan Hayam Wuruk, Papua telah dianggap sebagai bagian dari wilayah negara nusa Majapahit. Hal ini tercatat dalam Kitab *Negarakertagama* yang ditulis oleh Pujangga Prapanca tahun 1365, dalam Kidung 13, 14, dan 15 secara khusus memuat nama-nama daerah yang berada di bawah kedaulatan Majapahit dan salah satu daerah di antaranya adalah Wwanin atau Fakfak saat ini (Onim, 2007).

Posisi Fakfak yang menghadap langsung ke Maluku, laksana sebuah pintu gerbang yang menyambut mereka yang akan berkunjung ke Papua. Letaknya yang strategis dengan pelabuhan laut terbaik, memudahkan kapal dagang dari berbagai negeri bisa bersandar dalam berbagai jenis cuaca. Tidak mengherankan apabila sejak abad ke-15, Fakfak telah menjadi

wilayah terdepan di Papua yang telah dikunjungi oleh orang luar dari berbagai daerah dengan beragam kepentingan. Ada yang berkunjung untuk kepentingan ekonomi, ekspansi politik, pengambilan budak hingga penyebaran agama.

Berdasarkan data BPS 2013, jumlah penduduk Fakfak 71.069 jiwa. Terdapat lebih dari 14 suku bangsa hidup di Fakfak, terdiri dari bangsa pribumi dan pendatang yang berasal dari Maluku, Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Agama Islam merupakan agama mayoritas di Fakfak (53,80%), setelah itu agama Kristen (28,35%) dan Katolik (17,59%) (BPS Fakfak, 2013). Namun berbagai perbedaan tersebut tidak memicu konflik atau ketegangan antara agama, etnis dan budaya. Justru hubungan sosial antar masyarakat terjadi dalam relasi yang harmonis dan damai dan jarang terjadi konflik dalam skala besar seperti yang terjadi di tempat lain di Papua, meskipun pada tingkat tertentu potensi konflik selalu ada.

Dominasi Agama dan Budaya dalam Integrasi Sosial.

Pada dasarnya masyarakat Fakfak adalah masyarakat komunal yang sangat mementingkan hubungan persaudaraan dan kekerabatan. Pada awalnya hubungan persaudaraan itu hanya mengikat antara keluarga kemudian berlanjut antara suku lalu menjadi persaudaraan dalam satu wilayah geografis. Faktor sejarah tentang peperangan, permusuhan dan *pengayuan* (kanibalisme) antar suku dan kelompok yang menjadi dasar persaudaraan tersebut. Penguatan hubungan persaudaraan diyakini sebagai jalan untuk memelihara perdamaian dan menghadapi kekuatan musuh yang mungkin akan datang dari luar.

Kehadiran agama Islam sejak abad ke-16 dan Kristen serta Katolik pada abad ke-19 (Onim, 2007) dan perjumpaannya

dengan tradisi dan budaya Fakfak justru melahirkan sejumlah nilai dan norma sosial yang mengikat masyarakat Fakfak dalam keseimbangan. Masyarakat tidak ingin penetrasi agama memecah belah hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang telah terbentuk di antara mereka sejak lama. Maka terbentuklah tradisi *agama keluarga*, yang meyakini bahwa meskipun dalam satu keluarga ada perbedaan agama, tetapi mereka merasa harus tetap menjadi keluarga yang utuh sehingga perbedaan agama tidak menjadi soal bagi masyarakat di Fakfak.

Dari pemahaman ini muncul filosofi dan kearifan lokal yang disebut *Satu Tungku Tiga Batu*, sebagai lambang harmoni sosial di antara masyarakat. Secara sederhana filosofi *Satu Tungku Tiga Batu* merupakan gambaran kultural tentang persaudaraan masyarakat Fakfak. Dalam konstruksi tradisional masyarakat Fakfak, *Satu Tungku Tiga Batu* menggambarkan keseimbangan, ibarat satu tungku yang ditopang oleh tiga batu saat memasak makanan oleh orang-orang di zaman dahulu. Tanpa tiga kaki dari batu, tungku tersebut tidak akan stabil dan mengakibatkan masakan akan mudah tumpah. Tiga batu ini diibaratkan sebagai tiga agama besar yang berada di Fakfak yaitu agama Islam, Katolik dan Protestan (Iribaram, 2011). Dalam pemikiran masyarakat adat Fakfak, kalau tiga kaki dari batu itu stabil maka semua persoalan dapat diatasi dengan baik, sehingga implementasi dari filosofi *Satu Tungku Tiga Batu* dimaknai bukan saja dalam kehidupan beragama tetapi menjangkau semua aspek kehidupan dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar dari *Satu Tungku Tiga Batu* sebagaimana tertuang dalam bahasa Baham-Iha adalah tentang cinta kasih (*idu-idu*), perdamaian (*mani nina*) dan kerukunan (*yoyo*).

Idu-idu adalah pandangan bahwa semua orang Fakfak harus membangun

cinta kasih di antara mereka. Semua masalah harus diselesaikan dengan menanggalkan emosi dan menumbuhkan semangat cinta kasih yang menjadi dasar persaudaraan sejati. Sedangkan *Mani Nina* adalah pandangan bahwa tujuan hidup seseorang di dunia ini adalah untuk menciptakan perdamaian. Sehingga bagi masyarakat Fakfak, hanya orang-orang yang bisa menjaga perdamaian di dunia ini yang bisa memperoleh kedamaian di alam sesudah mati (akhirat). Adapun *Yoyo* adalah pandangan tentang kerukunan yang menjadi tanggung jawab semua orang Fakfak (Wawancara dengan Jubair Hubrow, 6 November 2013).

Beberapa praktik sosial yang melambangkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama dapat dilihat pada seremoni penyambutan Salib Tuhan Yesus yang melibatkan semua kelompok agama di Fakfak. Setiap hari besar agama seperti Lebaran dan Natal dirayakan dengan penuh kegembiraan, saling mengunjungi dan mengirim makanan dan hadiah. Demikian pula pembangunan rumah-rumah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama dengan tradisi *bakubantu/masohi* atau gotong royong di antara umat Islam dan Kristen. Tidak jarang seorang Kristen menjadi ketua pembangunan masjid, dan juga sebaliknya. Mereka menganggap agama yang mereka anut bukanlah alasan untuk memisahkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan di antara mereka. Maka dengan mudah kita dapat menemukan sebuah keluarga yang terdiri dari tiga agama; Islam, Kristen dan Katolik sebagaimana dituturkan oleh Bapak Simon Hindom sebagai berikut:

“Di keluarga saya, delapan bersaudara, ada yang menjadi Kristen, ada yang Islam, dan Katolik. Ada saudara saya haji, keponakan saya bahkan ada yang jadi pastor. Dalam tradisi kami di sini, sudah terbiasa berbagi agama, asalkan ikhlas dan taat. Jadi, misalnya karena

pernikahan seorang perempuan terpaksa menjadi mualaf. Maka, nanti salah satu anaknya disarankan ikut agama Kristen

atau Katolik. Ini demi kebersamaan". (wawancara dengan Simon Hindom, 28 Oktober 2013)



Gambar.1

Kerukunan Umat Beragama di Fakfak

Ket. Gambar.

1. Keterlibatan Umat Islam pada Penjemputan Salib
2. Arsitektur Masjid Tua Pattimburk yang menyerupai Gereja
3. Arsitektur Gereja Tua Danaweria yang menyerupai Masjid
4. Gambar di Mimbar Masjid yang menyerupai Salib

Satu Tungku Tiga Batu merupakan hasil akulturasi antara adat dan agama dalam masyarakat Fakfak yang melahirkan nilai-nilai toleransi, kerukunan dan kesediaan untuk menerima perbedaan. Melalui tradisi ini semua sengketa dan pertentangan dalam masyarakat Fakfak selalu diselesaikan dengan cara-cara dialogis yang dikenal dengan istilah *dudu tikar*. Dalam tradisi *dudu tikar*, semua masalah harus diselesaikan secara damai dan keluarga, karena berakar dari filosofi; *Idu-idu*, *Mani Nina* dan *Yoyo* yang telah disebutkan di atas. Tradisi *dudu tikar* adalah upaya untuk menjaga nilai-nilai tersebut, agar masyarakat Fakfak bisa terus hidup penuh cinta, rukun dan damai dengan sesama saudaranya.

Fenomena masyarakat Fakfak memperlihatkan bahwa integrasi sosial yang melintasi batas-batas agama dan budaya dapat terjadi dengan baik karena dibingkai dalam pemahaman kultural dan religiusitas masyarakat setempat.

Nilai-nilai agama dan budaya menjadi faktor dominan yang menopang harmoni dan perdamaian masyarakat Fakfak. Nilai-nilai tersebut menjadi fundamen atau *moral contract* (Parekh, 2008), yang mempengaruhi praktik sosial, sehingga praktik sosial yang terjadi berada dalam relasi yang harmonis dan tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjadi konflik. Antropolog Amerika Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski (1953) menyebut kondisi yang demikian itu sebagai *Cultural-Determinism* bagi masyarakat setempat, yaitu ketika dinamika sosial masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Sebenarnya hubungan antara agama dengan kebudayaan merupakan sesuatu yang ambivalen. Agama dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya memiliki wilayah yang bisa saling tumpang-tindih. Kenyataan tersebut

tidak selalu menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya atau sebaliknya. Sehingga dalam masyarakat Fakfak, agama dan budaya bisa menyatu dan menjadi dua unsur penting yang berperan dalam mempengaruhi aktifitas masyarakat. Seperti kajian Weber (1958) tentang etika Protestan dan munculnya kapitalisme di Eropa Barat, ataupun kasus agama Shinto dan budaya disiplin pada masyarakat Jepang. Ketika ajaran agama masuk dalam sebuah komunitas yang berbudaya, akan terjadi tarik menarik antara kepentingan agama di satu sisi dengan kepentingan budaya di sisi lain. Proses akulturasi antara agama budaya lalu melahirkan serangkaian norma sosial yang disebut Piere Bourdieu (1983) sebagai *habitus* yang melahirkan praktik-praktik sosial. *Habitus* itulah yang menjadi struktur mental atau kognitif yang dengannya orang-orang di Fakfak berhubungan dengan dunia sosial yang kompleks, dan terkadang antagonistik.

Proses Pelembagaan Nilai dalam Integrasi Sosial di Fakfak

Dalam kasus masyarakat Fakfak, proses pelembagaan nilai dan norma dapat ditemukan pada dua bentuk; *pertama*, semangat agama keluarga yang melahirkan *Satu Tungku Tiga Batu* yang kemudian diadopsi sebagai spirit dalam hampir semua aktifitas sosial, keagamaan, politik bahkan ekonomi. Inilah yang disebut norma sosial yang melembaga (*institutionalized*). Pemerintah adalah salah satu agen utama yang mengadopsi filosofi *Satu Tungku Tiga Batu* sebagai asas untuk membentuk kehidupan politik di Fakfak yang seimbang dan harmonis. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan sehingga memandang perlu untuk melembagakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan politik. Dalam ranah politik lokal di Fakfak, muncul konsensus politik

untuk membagi jabatan-jabatan politik berdasarkan kekuatan-kekuatan lokal; agama dan etnis. Apabila bupati adalah seorang muslim, maka wakil bupati harus berasal dari kalangan Kristen atau Katolik. Demikian juga pada jabatan-jabatan SKPD dan birokrasi daerah, termasuk rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) juga memberi tempat kepada marga-marga asli orang Fakfak dan para pendatang.

Model politik akomodasi seperti ini memungkinkan kekuatan-kekuatan politik di Fakfak tetap terakomodir dan tidak ada yang merasa ditinggal, sehingga meminimalisir potensi konflik. Namun secara faktual politik bagi-bagi jabatan berdasarkan agama ini rawan disalahgunakan oleh para aktor politik lokal dalam perebutan jabatan politik. Kasus perselisihan personal antara Bupati Uswanas dan Wakilnya Nimitkendik telah menarik agama ke dalam konflik politik. Hal ini menunjukkan bahwa bila tidak hati-hati politisasi agama pada tingkat tertentu dapat berpotensi membenturkan kekuatan-kekuatan agama di Fakfak dalam konflik yang tidak diinginkan.

Selain masalah politik, praktik keseimbangan juga diterapkan dalam masalah-masalah ekonomi sehingga tidak terlalu dikuasai oleh etnis pendatang. Pembangunan ekonomi di Fakfak didorong untuk membuka kesempatan luas kepada masyarakat asli Fakfak sehingga tidak terlalu tertinggal dari etnis pendatang. Mereka diberikan hak monopoli untuk memiliki perkebunan-perkebunan pala di seluruh Fakfak. Pala menjadi komoditi unggulan yang dikuasai orang-orang Fakfak sejak dahulu, karena di tanam di atas tanah-tanah ulayat yang luas. Hak monopoli ini memberi mereka kemandirian ekonomi ketika berhadapan dengan masyarakat pendatang asal Bugis-Makassar, Cina dan Arab yang agresif dalam aktifitas

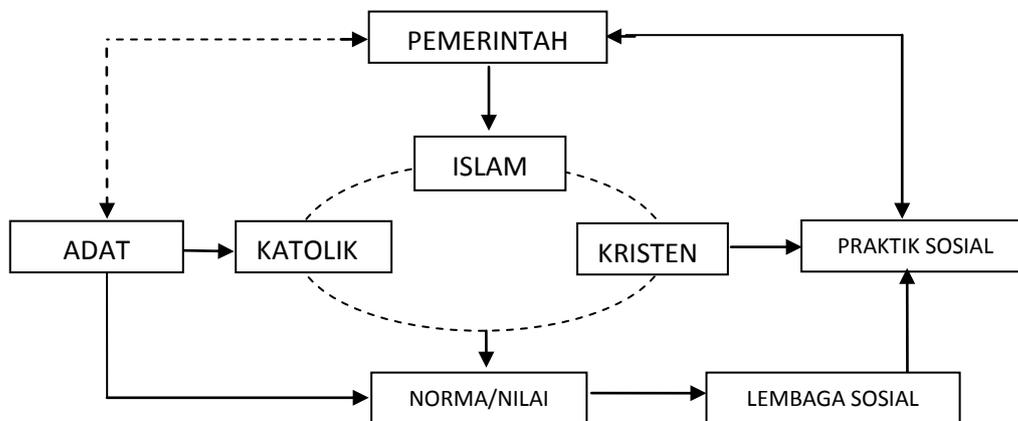
perekonomian dan perdagangan. Namun untuk memasarkan biji-biji pala tersebut masyarakat Fakfak bergantung pada pembeli lokal yang biasanya berasal dari etnis pendatang. Selain membeli pala dari masyarakat, para pedagang juga mendatangkan berbagai jenis barang dagangan; sandang, pangan dan papan yang dibutuhkan oleh masyarakat Fakfak. Relasi ekonomi yang demikian telah membentuk suatu hubungan yang saling membutuhkan (*symbiosis mutualism*), yang pada akhirnya meminimalisir proses permusuhan antara komunitas lokal dengan pendatang.

Pemerintah Fakfak juga berperan penting dalam memperkecil potensi konflik dalam hubungan-hubungan ekonomi. Pemerintah mendorong masyarakat asli Fakfak untuk terlibat dalam aktifitas ekonomi di pasar. Untuk kepentingan tersebut, pemerintah menyediakan tempat khusus bagi masyarakat lokal untuk berdagang di pasar Tumburuni Fakfak. Mereka menyediakan lapak-lapak untuk berjualan berbagai produk pangan lokal dan buah-buah musiman di lantai satu pasar tersebut. Setidaknya kebijakan

ini dapat menghindari kecemburuan sosial akibat praktik ekonomi yang hanya dikuasai kelompok pendatang. Di seluruh tempat di Papua, pasar bukan saja menjadi tempat aktifitas ekonomi namun juga telah menjadi arena kontestasi identitas, lokal dan pendatang. Sehingga sering terjadi konflik dan kekerasan yang bermula dari pasar yang dianggap sebagai simbol dominasi. Orang-orang Papua yang hanya bisa membuka lapak di pinggir jalan sambil memandangi dengan cemburu orang Bugis, Makassar dan Jawa yang menguasai pasar-pasar di Papua. Maka penting untuk memastikan bahwa masyarakat asli Papua agar memiliki akses dan kekuasaan terhadap pasar untuk menunjukkan bahwa sebetulnya mereka adalah penguasa di pasar dan bukan sekedar *jongos* dari majikan yang entah datang darimana. Pemerintah Fakfak menyadari situasi tersebut dan membuat kebijakan untuk memberi hak kepemilikan kepada para pedagang lokal di Fakfak untuk menempati tempat khusus dan strategis di pasar Tumburuni Fakfak. Hal ini mengurangi potensi konflik sosial karena kecemburuan ekonomi antara masyarakat asli dan pendatang.

Gambar. 2.

Skema Pelembagaan Nilai dalam Masyarakat Fakfak



Kedua, proses pelembagaan nilai dalam bentuk yang formal dan terorganisir dapat ditemukan pada sejumlah organisasi sosial yang menjalankan fungsi pengendalian sosial. Lembaga sosial yang demikian dapat ditemukan pada sejumlah organisasi formal baik yang telah hadir sejak dahulu, maupun yang baru dibentuk untuk menjaga dan mengawasi agar praktik-praktik sosial di Fakfak tetap berada dalam kerangka nilai dan norma lokal yang telah hidup dalam masyarakat. Lembaga sosial dimaksud adalah:

Tujuh lembaga adat Pertuanan (kerajaan) yang telah eksis sejak beberapa abad lampau, lembaga kerajaan yang memiliki wilayah yang luas dan masyarakat yang majemuk. Raja menjadi penguasa kultural yang berperan penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik. Oleh sebab itu dalam setiap kerajaan, memiliki lembaga pengadilan adat yang mengadili perkara-perkara adat antar warga masyarakat.

Dewan Adat Baham-Mata dan Pengadilan Adat yang didirikan pada tahun 2007 sebagai organisasi adat hasil *output* dari implementasi UU No.21 tentang Otonomi Khusus Papua. Dewan Adat berperan dalam mengendalikan konflik sosial melalui jembatan aspirasi antara kelompok-kelompok yang menyuarakan kemerdekaan Papua dan Pemerintah. Meskipun pada tingkat tertentu kelompok ini sering dituduh sebagai kekuatan separatis di Fakfak, namun mereka telah menjadi katalisator yang baik bagi kelompok-kelompok lokal yang mengusung ide kemerdekaan Papua. Sementara itu lewat Pengadilan Adat, mereka juga berperan dalam menyelesaikan sejumlah sengketa, konflik dan pertentangan antar kelompok.

Lembaga-lembaga keagamaan, MUI, GKI, GPI, Pastoral dan FKUB yang menjadi kekuatan sosial yang terus

mengingatkan umat tentang pentingnya menjaga toleransi, kerukunan dan saling menghormati di antara umat beragama. Kelompok ini secara spiritual terus memperkuat filosofi *Satu Tungku Tiga Batu*, bukan saja sebagai tanggung jawab sosial tetapi juga tanggungjawab keimanan.

Paguyuban Etnis Nusantara yang terdiri dari berbagai etnis; Sulawesi, Buton, Seram, Maluku, Jawa dan Sumatera yang juga memiliki peran dalam membangun saling pengertian antara masyarakat pendatang dan masyarakat asli Fakfak.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut memiliki misi yang sama yaitu menjaga agar hubungan sosial antara agama, etnis dan budaya di Fakfak tetap berjalan harmonis dan damai. Mereka berfungsi sebagai pengendali sosial dan memastikan bahwa hubungan sosial dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik. Bahkan lembaga adat seperti pengadilan adat memegang kunci sebagai resolusi konflik pada tahap yang paling awal, melalui kewenangannya untuk menangani sengketa-sengketa adat, hak ulayat, pelanggaran susila, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga penghinaan agama. Dalam beberapa kasus seperti perkelahian antar kampung, polisi langsung menyerahkan kepada Pengadilan Adat untuk diselesaikan secara adat. Proses penyelesaian konflik secara kultural tersebut lebih diterima oleh masyarakat adat karena dianggap lebih memuaskan ketimbang penyelesaian melalui mekanisme hukum negara.

Apa yang terjadi di Fakfak menunjukkan bahwa sistem nilai dalam masyarakat dapat berjalan dan fungsional apabila menjelma menjadi sistem sosial yang kuat dan melembaga (Soekanto, 2000). Dalam perspektif reproduksi sosial, seperti yang digambarkan Bourdieu (Harker, 2009), sistem nilai (*habitus*) harus dapat diterima, disepakati, difungsikan dan secara formal dapat diterapkan

untuk mempengaruhi interaksi sosial dan memelihara keteraturan sosial. Pemikiran semacam ini mengandaikan bahwa arena sosial, ekonomi dan politik dapat dipengaruhi (distrukturkan) oleh nilai dan norma atau sebaliknya arena tersebut yang mempengaruhi (menstrukturkan) praktik-praktik sosial. Tradisi membutuhkan aktifitas ritual dan lembaga-lembaga adat untuk tetap mempertahankan eksistensinya. Bahkan lebih dari itu nilai-nilai budaya harus bisa berebut pengaruh dalam ruang-ruang politik dan ekonomi yang seringkali berjalan dalam logika yang kontradiktif.

Masa Depan Integrasi Sosial di tengah Perubahan Sosial di Papua.

Masyarakat Fakfak dan segenap kebudayaannya adalah sesuatu yang dinamis dan akan terus mengalami perubahan sesuai konteks ruang dan waktu. Setiap saat nilai-nilai budaya akan menghadapi tantangan, benturan bahkan kontestasi dengan nilai-nilai yang lain yang datang dari luar. Ataupun nilai-nilai baru yang muncul dari dalam masyarakat sebagai konsekwensi dari proses perubahan itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa mengidentifikasi beberapa persoalan sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Fakfak.

Pertama, penyelesaian berbagai masalah di Papua seperti masalah-masalah politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum yang belum tuntas, diyakini secara struktural maupun kultural akan terus menekan masyarakat Fakfak. Sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Papua Barat, masyarakat Fakfak tidak bisa menghindar dari berbagai problematika yang terjadi di kota-kota besar seperti Jayapura dan Manokwari dan berpengaruh ke banyak daerah di wilayah Papua lainnya. Isu-isu politik seperti separatisme dan otonomi khusus turut membelah masyarakat dalam

kelompok yang saling bertentangan. Kehadiran kelompok-kelompok yang semakin militan dalam memperjuangkan hak-hak politik Papua di Fakfak seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) pimpinan Arnoldus Koncu, dan kelompok yang berlawanan seperti Barisan Merah Putih pimpinan Islamil Bauw, serta milisi-milisi sipil yang disponsori aparat keamanan dalam konfliknya dengan kekuatan-kekuatan pro-kemerdekaan Papua merupakan tantangan yang tidak mungkin bisa diabaikan. Sementara pemberlakuan Otonomi Khusus dengan segala implikasinya dan pembangunan yang belum melahirkan kesejahteraan masih menjadi pertanyaan tentang kapan Papua bisa bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Kedua, Potensi konflik keagamaan yang diintrodusir melalui isu Islamisasi dan radikalisme agama yang sedang berlangsung di Papua juga menjadi tantangan di Fakfak. Perubahan demografis dengan meningkatnya populasi umat Islam secara signifikan, ternyata dirasakan sebagai ancaman serius bagi sebagian besar masyarakat Kristen Papua. Sebab bagi sebagian gerakan-gerakan pro kemerdekaan, Islamisasi secara tidak langsung dianggap sebagai proses Indonesianisasi (Warta, 2011).

Orang-orang Islam Papua sendiri menyadari konstruksi identitas Papua yang Kristen. Saat ini mereka sedang berupaya merekonstruksi kembali sejarah agama di Papua, bahwa Islam pada dasarnya bukan merupakan agama baru di Papua tetapi justru merupakan agama pertama yang dikenal masyarakat Papua. Klaim ini berdasarkan fakta sejarah yang terus dimunculkan bahwa Islam telah lama hadir hampir dua abad sebelum agama Kristen masuk ke Papua. Beberapa publikasi yang terkenal misalnya tulisan Toni Wanggai (2009) "Rekonstruksi Sejarah Masuknya Islam di Papua", dan

tulisan Ali Atwa (2008) "Islam atau Kristen Agama Orang Papua?", merupakan upaya intelektual muslim Papua untuk memperkuat klaim sejarah Islam di Papua. Bahkan pemerintah daerah Kabupaten Fakfak pernah membuat penelitian yang diseminarkan pada tahun 2006 tentang sejarah masuknya Islam di Papua. Kesimpulan penting dari seminar tersebut bahwa Islam adalah agama pertama yang masuk ke Papua dan oleh karenanya merupakan agama *tuan tana* di Papua. Kesimpulan ini bukan sesuatu yang baru, tetapi belum menjawab pertanyaan tentang mengapa Islam tidak bisa berkembang baik di Papua, seperti yang disinyalir sejumlah penulis Kristen bahwa hal tersebut terjadi karena Islam kurang bisa diterima oleh masyarakat Papua yang memiliki kebudayaan yang khas (Onim, 2009).

Fakfak sendiri telah menjadi salah satu mercusuar dakwah Islam di Papua, sehingga banyak orang menyebut Fakfak sebagai "Serambi Mekkah-nya" Papua. Fakta ini tidak terbantahkan karena dari 71.069 jumlah penduduk Fakfak pada tahun 2012, mayoritas beragama Islam (53,80%), dan sebagian besar di antaranya adalah muslim pribumi yang cukup taat bahkan sebagian telah menjadi tokoh-tokoh Islam yang populer di Papua. Di sini berdiri salah satu gerakan Islam yang paling agresif dalam dakwah Islam di Papua, yaitu Al-Fatih Kaafah Nusantara (AFKN), sebuah organisasi dakwah yang didirikan oleh Ustadz Mohamed Zaaf Fadzan Garamatan, seorang warga asli Fakfak. AFKN memiliki misi untuk melanjutkan proses Islamisasi di Papua yang sempat terhenti oleh misi zending dan kolonialisme Belanda. Bagi beberapa kelompok Kristen di Papua, keberadaan ormas Islam dengan dakwahnya yang semakin marak belakangan ini telah menjadi ancaman bagi Kristen (ICG, 2008).

Kontestasi yang demikian menjadikan hubungan antar agama di hampir seluruh tempat di Papua, termasuk Fakfak menjadi tegang. Padahal sebagaimana telah dibahas dalam bagian-bagian sebelumnya bahwa Fakfak adalah daerah muslim terbesar di Papua yang berhasil meletakkan dasar-dasar toleransi yang kuat yang berakar pada kultur dan adat-istiadat masyarakat setempat. Pertanyaan yang fundamental saat ini adalah bagaimana mempertahankan norma dan kearifan lokal di Fakfak agar tetap fungsional di tengah berbagai tekanan dan proses perubahan sosial yang seringkali tidak bisa dicegah. Perubahan sosial terjadi pada semua masyarakat dalam setiap proses dan waktu dengan dampak yang bisa positif ataupun negatif. Dalam beberapa kasus proses integrasi sosial melemah justru sejalan dengan semakin melemahnya nilai-nilai sosial yang selama ini berfungsi sebagai *crosscutting affiliation* dan *crosscutting loyalty* dalam sebuah masyarakat. Sebagaimana kasus melemahnya tradisi *pela* dan *gandong* yang tidak bisa mengendalikan konflik sosial bernuansa agama di Ambon. Sebagian sosiolog percaya bahwa modernisasi yang melanda Indonesia (termasuk komunikasi dan budaya) menjadi salah satu penyebab bergesernya orientasi nilai budaya seperti *pela* dan *gandong* yang bersifat kultural religius, melemah menjadi bersifat simbolik semata. Hal ini terutama di kalangan anak-anak muda yang tidak memiliki *cultural sense* terhadap kebudayaannya sendiri.

Masyarakat Fakfak membutuhkan strategi bertahan dari globalisasi dan modernisasi yang membawa serta pengaruh-pengaruh buruk bagi eksistensi kebudayaan. Maka masyarakat lokal seperti di Fakfak tidak memiliki pilihan lain selain melakukan penguatan nilai-nilai budaya, juga perlu beradaptasi secara keratif, sehingga bisa menerima proses perubahan tanpa harus larut dalam

perubahan itu sendiri. Masyarakat perlu mengenali lingkungan strategisnya, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa masyarakat Fakfak bisa mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya justru karena mereka membuka diri terhadap kebudayaan lain sehingga beragam kebudayaan, ideologi dan agama yang masuk ke Fakfak saling berinteraksi dan membentuk kebudayaan Fakfak saat ini. Kehadiran berbagai kelompok pendatang dari Maluku, Sulawesi, Arab dan Cina sejak beberapa abad lalu justru telah memperkaya kebudayaan Fakfak. Upaya lainnya adalah melakukan transformasi kultural agar budaya-budaya lokal selalu sesuai dengan semangat zaman. Itu artinya selain membuka diri pada perubahan, masyarakat juga dituntut untuk melakukan tafsir dan kontekstualisasi terhadap tradisi, budaya, dan adat istiadat yang mungkin dianggap tidak sesuai lagi dengan kehidupan saat ini.

Catatan Penutup.

Kajian ini menunjukkan bahwa dinamika sosial di Papua bukan hanya tentang konflik dan kekerasan, sebab kita masih bisa menemukan harmoni dan perdamaian di wilayah-wilayah tertentu di Papua yang berkontribusi terhadap penguatan integrasi sosial sebagaimana terjadi di Fakfak, Papua Barat. Masyarakat Fakfak berhasil menjaga wilayahnya untuk tidak jatuh dalam konflik dan anarkisme sebagaimana

yang terjadi hampir di semua tempat di Papua. Agama dan budaya telah menjadi faktor determinan yang memperkuat integrasi sosial dalam masyarakat Fakfak yang majemuk. Integrasi sosial tersebut dibentuk dari akulturasi antara nilai-nilai agama dan budaya yang melahirkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar masyarakat yang berbeda agama, etnis dan budaya. Nilai-nilai tersebut kemudian dilembagakan dalam filosofi *Satu Tungku Tiga Batu* yang menjadi norma dan kearifan lokal yang mengikat masyarakat Fakfak dalam satu keseimbangan.

Namun studi ini juga menemukan bahwa harmoni dan perdamaian pada masyarakat Fakfak memerlukan penguatan terus-menerus karena rentan dengan berbagai isu politik di Papua yang pada tingkat tertentu memecah masyarakat kedalam kelompok yang saling mencancam, seperti Pro-Merdeka dan Pro-NKRI. Sementara itu, munculnya isu Islamisasi yang didukung oleh kehadiran kelompok-kelompok keagamaan yang radikal dengan jaringan yang semakin meluas dan tidak toleran pada perbedaan agama, seperti HTI, Laskar Jihad dan AFKN serta gereja-gereja ekstrim dari kalangan Kharismatik dan Pantekosta juga patut di perhatikan. Oleh sebab itu, masyarakat Fakfak dan institusi sosial di sana perlu diperkuat untuk mempertahankan harmoni dan keragaman di tengah berbagai tekanan yang ada. Mungkin diperlukan kreatifitas dalam beradaptasi dan kemampuan melakukan transformasi agar nilai-nilai lokal tetap aktual di tengah berbagai perubahan.

Daftar Pustaka.

- Bertrand, Jacques. *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Newyork: Cambridge University Press. 2004
- Bourdieu, Pierre. *Outline of a Theory of Practice*. United kindom: : Cambridge University, 1997

- Language and Symbolic Power*. Massachusetts: Harvard University Press, 1991
- Ernas, Saidin. *Perjanjian Malino dan Penyelesaian Konflik Mauluku*. Tesis Magister pada Program Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006.
- Harker, Richard, (edit). (*Habitush x Modal*)+*Ranah=Praktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Jalasutra, 2009
- Iribaram, Suprpto. *Satu Tungku Tiga Batu (Kerjasama Tiga Agama dalam Kehidupan Sosial di Fakfak)*. Yogyakarta: Tesis Magister pada Program Pascasarjana Antropoli Universitas Gadjah Mada, 2011
- Nugroho, Heru. *Konstruksi Sara, Kemajemukan dan Demokrasi*, UNISIA, No.40/XXII/1999.
- Onim, J.F.. *Islam dan Kristen di Tanah Papua*. Bandung: Jurnal Info Media, 2006
- Parekh, Biku.. *A New Politics of Identity*. New York: Palgrave Macmillan, 2008
- Rethinking Multiculturalism, Keragaman Budaya dan Teori Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Pranawati, Rita (edit.). *Kebebasan Beragama dan Integrasi Sosial*. Jakarta: Center for Study of Religion and Culture (CSRC), 2011
- Putuhena, Saleh. *Studi Sejarah Masuknya Islam di Fakfak*. Diproduksi oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak, 2006
- Rauf, Maswadi. *Konsensus Politik Sebuah Penjajagan Teoritik*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2000.
- Ritzer, George.. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta; Rajawali Press, 1992
- dan Douglas J. Goodman.*Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Nurhadi, "Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Moderen". Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009
- Soekanto, Soerjono.*Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Takwin, Bagus. "Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Oposisi Biner dalam ilmu Sosial, Pengantar dalam Richard Harker, (edit.), (*Habitush x Modal*)+*Ranah=Praktik, Pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Jalasutra, 2009.
- Warta, Cristian. "Perkembangan Masalah Agama di Papua: Sengketa antar Agama dan Pencegahan Konflik", dalam Fajar Ibnu Tufail (edit.), *Politik Identitas Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Widjoyo, Muridan S. *Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Yayasan TIFA, 2009.
- Wanggai, Toni Victor M. *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. 2009.